

## AMBIVALENSI RADIKALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH

Rohmadi

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

hamzahzado@gmail.com

### Abstract

*There is no sexiest word besides Radicalism. Its existence often makes people stricken with fear. Even those who guessed that the end of radicalism was a brutal act of terrorism. The end of the religion is related. Various types of prevention are carried out by various official governmental and private institutions. The aim is none other than so that the ideas that lead to acts of terror can be stopped. In understanding the meaning of radicalism, many are confused, because if it is traced, the equivalent of the word radicalism is not in accordance with the meaning. Because the meaning of the radik is root / rooted (meaning deep thinking / philosophizing), while people do too much, they may not necessarily think deeply. Meanwhile, the word ism itself which contains the meaning of a notion, should be distinguished by an act that ends brutally. Herein lies the error, the word used to describe this should be extremism. Because there are always people who overdo it.*

*That the symptoms of radicalism among Muslims in the post-New Order era can be seen as an 'act of identity' carried out in order to respond and answer the crisis of identity they experienced in the midst of dramatic and dramatic changes that occurred in Indonesia in the early phase of transition to democracy. not right if always associated with religion. But it does not mean that in religion there is no action, in any religion there are always people who interpret religion in a textual way, raping the scriptures for their interests. So that short-sightedness leads to brutal action / terror. The Muhammadiyah which is the main guardian of the Unitary State of the Republic of Indonesia will also not agree with various kinds of violence, occupation and deviant acts. It's just that Muhammadiyah suggested that the handling that smelled of Islam be carried out with a persuasive approach. Therefore, if the government insists on repressive actions, new terrorists will emerge. The emergence of radicalism cannot be separated from the long history of this nation, herein lies the ambivalent nature that we must seek and solve together, so that such ideas do not reappear.*

**Keywords:** *Ambivalensi, Radikalisme, Muhammadiyah*

Submit: 7 Agustus 2018

Accepted: 16 Oktober 2018

Publish: 25 Desember 2018

### A. PENDAHULUAN

*“Begitu berkuasa, orde baru dengan cepat mengambil kebijakan yang keras terhadap organisasi Islam secara umum. Alasannya sangat jelas: dengan disingkirkannya komunis, Islam politik satu-satunya kekuatan di Indonesia yang memiliki potensi untuk memobilisasi diri. Munculnya kekuatan Islam yang mengorganisir dengan basis akar rumput yang kuat, jelas*

*menentang logika dasar orde baru yang memulai pembangunan kapitalis diatas basis stabilitas sosial yang mulai muncul politik demobilisasi secara luas.”(Harian IndoPROGRESS, 2007)*

Akhir-akhir ini kondisi bangsa Indonesia nampak menghangat, meskipun tidak sampai menimbulkan kekacauan dan pertumpahan darah, suasana panas ini sangat terasa, bahkan di pelosok desa ikut merasakan suasana Jakarta. Salah satu hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai Pancasila, sehingga perdebatan menjadi meluas dan tidak produktif. Sebelum terjadinya perdebatan panas ini, terlebih dahulu ada beberapa aksi bela Islam yang dimotori oleh Habib Rizieq beserta kawan-kawannya yang menuntut kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering disebut dengan Ahok. Suhu politik makin panas ketika menjelang Pilkada DKI. Di satu sisi mereka menggunakan sentimen agama dalam memilih pemimpin, karena memang ada perintah ataupun petunjuk dalam Kitab Suci, di sisi lain menggunakan sentimen ‘Kebhenikaan’ sebagai bentuk senjata untuk membungkam lawan politik. Meskipun Pilkada DKI telah usai dan pemenangnya telah diumumkan, namun suasana panas ini belum juga reda. Kemenangan salah satu kubu dianggap sebagai sebuah kemenangan kelompok Islam. Tentu saja hal ini tidak bisa dilepaskan dari mobilisasi massa yang ada dalam berbagai aksi yang dinamakan bela Islam itu. Meskipun di akhir-akhir aksi tersebut cenderung membela oligarki dan kelihatan muatan politisnya. Dengan terus menerusnya aksi massa hingga beberapa kali menyebabkan suasana nampak panas, muncul lagi sentimen Pancasila diberbagai kesempatan.

Topic pembicaraan mengenai Pancasila ini mulai dari kalangan *alit* hingga *elit*. Kalangan *alit* merupakan golongan bawah ataupun rakyat jelata yang juga nampak serius dalam membicarakan Pancasila, meskipun level yang dibicarakan sekedar *ngomong klobot* sambil *nyruput* kopi, tetapi itu merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap Pancasila. Kalangan *elit* juga tak mau ketinggalan, mereka yang diwakili oleh kelompok cerdas-pandai nampak begitu antusias dalam berbagai kesempatan. Mereka membicarakan mulai dari media sosial, media

cetak, dan juga elektronik. Kadang-kadang perdebatan mereka juga berakhir dengan debat kusir, karena tak ketemu kesepakatan dan tak jelas apa tujuan.

Pencasila memang begitu cantik nan elok hingga diperbutkan oleh berbagai pihak yang menginginkan menjadi miliknya. Meskipun orde baru telah tumbang hampir 20 tahun, tetapi nuansa penguasaan tafsir ini sangat kentara akan didominasi oleh kelompok tertentu. Paling baru adalah munculnya kelompok yang mendakwa bahwa sudah menjadi pancasilais sejati, dan menganggap orang lain belum atau tidak Pancasilais. *Tahdzir-mentahdzir* ini memang bukan suatu hal yang wajar, akan tetapi ini sudah dalam level ekstrim. Jika ini terus menerus tentu saja tidak akan menjadikan manusia produktif, tetapi justru menimbulkan disharmonisasi antar sesama dan akan timbul disintegrasi. Mungkin saat ini bangsa Indonesia sedang berada di simpang jalan ideologi, meskipun saat ini tidak seperti di awal-awal kemerdekaan, namun suasana pertentangan ideologi itu nampak kembali hadir di tengah-tengah kita. Pada satu sisi, ada kelompok yang mulai bergerilya memasarkan sekulerisme di Indonesia. Mereka ingin mengenyahkan agama dari dimensi kenegaraan, menggugat seluruh norma agama yang sudah melekat dalam jati diri bangsa.

Atas nama Hak Asasi Manusia, demokrasi, dan kebebasan berpendapat ada kelompok yang secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi meminta pelegalan hubungan sesama jenis, mereka menuntut negara untuk melegalkan hubungan yang telah dikutuk oleh seluruh ajaran agama di dunia. Atas nama pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang entah untuk siapa, rakyat kecil banyak yang digusur dan dimarginalkan. Terusir dari tanah warisan yang telah bertahun-tahun ditempati, kemudian tau-tau pemerintah datang mengeklaim bahwa tanah itu milik pemerintah. Selanjutnya tanah itu entah darimana rimbanya tau-tau tumbuh gedung-gedung tinggi yang tak akan pernah diinjak oleh rakyat jelata. Lain pula dengan kelompok yang bergerilya untuk mendikte pemerintah menggunakan prinsip liberalisme dalam politik dan ekonomi, sehingga muncul sponsor untuk aneka macam perundangan untuk menguntungkan

segelintir orang, bahkan keran telah dibuka seluas-luasnya untuk bangsa asing untuk menguasai seluruh sumber daya alam yang jelas-jelas sangat merugikan rakyat secara keseluruhan.

Di pihak lain adapula yang belum bisa *move on* dari masa lalu, mereka beranggapan bahwa ia hanya menumpang hidup di negerinya sendiri. Menganggap pemerintah beserta aparatusnya sebagai *taghut* yang harus dimusuhi, mereka selalu menginginkan agama Islam sebagai dasar negara, serta mewajibkan syariat Islam secara *kaffah* untuk diterapkan di Indonesia. Selain hal ini, adapula ideologi anti-tuhan yang berlambang palu-arit juga nampak ikut, meskipun di negara asalnya sudah mengalami kebangkrutan total, dan hanya tersisa *marchandise* sebagai oleh-oleh para turis. Munculnya berbagai macam ideologi tersebut tidak bisa dilepaskan dengan adanya kran reformasi. Segala bentuk keangkuhan orde baru telah ditumbangkan oleh reformasi, kemudian muncul era demokrasi dengan segala kurang-lebihnya yang sampai hari masih berlangsung. Di sisi lain ini bagus untuk perkembangan bangsa ke arah yang lebih baik, tapi di sisi lain juga menimbulkan dampak yang tidak bisa disepelekan. Kran reformasi juga membawa dampak munculnya berbagai macam ideologi yang mengancam, memang di sisi lain ideologi ini ada yang membawa manfaat tapi adapula yang membawa *mudhorot* dan kadang-kadang berakhir dengan ekstrimisme ataupun juga dengan istilah radikalisme. Dengan munculnya berbagaimacam infiltrasi ideologi, maka tentu saja harus ada solusi untuk mengatasai itu semua. Sebetulnya mereka juga bertujuan sama, antara mengisi, mewarnai tafsir Pancasila, namun dengan cara mereka sendiri. Dalam makalah ini akan membahas kebingungan dari radikalisme agama itu sendiri, serta peran ormas dalam mencegah faham menyimpang serta menjaga kedaulatan bangsa.

## **B. MAKNA DAN PENYEBAB RADIKALISME**

Cara apa kira-kira yang tepat untuk membaca konflik kekerasan ataupun radikalisme agama yang cenderung sekterian yang sering mengatasnamakan Islam yang sangat menonjol ini. Banyak orang memang sedang memikirkan solusi untuk masalah yang cukup pelik ini. Untuk

mengkategorikan hal ini nampaknya kita perlu melihat kategorisasi dari salah seorang filsuf yaitu Slavoz Zizek, menurutnya jenis kekerasan yang terjadi mulai dari kekerasan langsung/fisik (bom bunuh diri, penyerangan, pengusiran, perampokan, dan perampasan harta milik kelompok yang berbeda penafsiran dari penafsiran umum dalam aspek-aspek tertentu ajaran Islam dan terhadap mereka yang bukan Islam), hingga kekerasan ideologis (rasisme, penghinaan, dan diskriminasi seksual) terhadap nilai-nilai yang dipandang tidak Islami. .”(Harian IndoPROGRESS, 2011)

Menarik untuk disimak, dari seluruh aksi kekerasan yang sektarian ini, Negara hanya bertindak tegas pada kasus teror bom. Selain itu Negara nampak abai pada dan cenderung membiarkan terhadap terjadinya tindak kekerasan komunal yang merenggut banyak korban jiwa. Mulai penyerobotan, penggusuran tanah milik rakyat tanpa kompromi. Akibatnya muncul tindakan tegas yang hanya berfokus pada teror bom ini dipandang sinis oleh sebagian orang sebagai hasil dari pesan barat dalam perang melawan terorisme yang itu juga merupakan kelanjutan dari perang dingin. Sebelum berbicara masalah yang dianggap bersumber dari radikalisme ini, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu makna dari radikalisme itu sendiri.

Sepanjang pembacaan definisi mengenai radikalisme dari referensi-referensi yang ada, sementara belum kita temukan bahwa radikalisme mengarah pada suatu ajaran agama, apalagi ditujukan secara khusus kepada Islam. Kebanyakan definisi dari berbagai macam buku mengarah atau mengaitkan dengan politik. Radikalisme berasal dari bahasa Latin “radix” yang berarti “akar”. Menurut Encyclopedia Britannica, kata radikal dalam konteks pertama kali pertama kali digunakan oleh Charles James Fox pada tahun 1797, ia mendeklarasikan “reformasi radikal” sistem pemilihan, sehingga istilah ini digunakan untuk pergerakan yang mendukung reformasi parlemen. Radikalisme adalah istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk mendukung gerakan radikal. Dalam sejarah, gerakan ini dimulai di Britania Raya ini meminta reformasi pemilihan secara radikal. Gerakan ini awalnya menyatakan dirinya sebagai partai kiri yang jauh

menentang partai kanan jauh. Begitu “radikalisme” historis mulai terserap dalam perkembangan liberalisme politik, pada abad ke-19 makna istilah radikal di Britania Raya dan Eropa daratan berubah menjadi ,

Radikalisme tentu saja mengacu pada beberapa hal di antaranya; ekstremisme, dalam politik yang berarti tergolong ekstrim radikal kiri dan ekstrim radikal kanan. Radikalisasi ini merupakan transformasi dari sikap pasif atau aktifisme kepada yang lebih radikal, revolusioner, ekstrem, atau militan. Sementara istilah radikal biasanya dihubungkan dengan gerakan-gerakan ekstrem kiri, radikalisasi tidak membuat perbedaan seperti itu. Dalam KBBI (online) makna dari radikalisme adalah 1). Paham atau aliran yang radikal dalam politik; 2). Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; 3). Sikap ekstrim dalam aliran politik. (KBBI Online) Menurut Muhammad al-Fayyadl dalam sebuah seminar deradikalisasi mengatakan, kata radikal ini tidak tepat jika disematkan dengan kasus yang mengarah pada terorisme, sebab kata radikal berasal dari kata radix yang berarti inti atau dasar. Sedangkan orang-orang yang selama ini dicap radikal belum tentu dapat berpikir secara mendasar, utuh, dan menyeluruh alias berfilsafat. Meski sebagian orang terindoktrinasi itu juga berpikir rasional, mereka tidak pernah merefleksikan ajaran agamanya. Bagi mereka agama itu sesuatu yang tunggal, siapa yang memberi perintah yang menentukan. (Tempo) Dengan demikian jika secara letterlijk bisa dimaknai bahwa berpikir inti tersebut sama dengan berfilsafat, karena sama-sama berpikir keakarnya.

Sementara kata-kata isme itu sendiri selalu merujuk pada suatu paham atau ideologi yang pernah ada. Radikalisme sendiri bisa berupa sebuah ide atau gagasan, tentu saja hal ini tidak masalah. Namun jika sudah berupa aksi tindakan kekerasan yang merugikan orang lain, maka hal ini tidak bisa dibiarkan. Namun demikian yang patut kita ketahui dan cermati bahwa asal muasal tindakan radikalisme muncul dari salah satu aliran politik, bukan dari ajaran agama tertentu.

Dengan kata lain dapat pula dinyatakan bahwa gerakan radikal tidak bersumber dari agama, tetapi bisa jadi kesalahan pemahaman agama sehingga menimbulkan gerakan radikal.

Apabila ditimbang-timbang, ada baiknya kata radikal tersebut diganti dengan istilah “ekstrem”, sebab kata ini memang ada padanannya dalam Islam, yaitu tatharuf atau ghuluw. Keduanya berarti tindakan melampaui batas-batas syariat Islam. Karena memang sebagian orang ada bersikap ekstrem dalam memahami dan menjalankan ajaran agamanya. Ada yang dengan mudah mengkafirkan orang Islam yang lain, hanya karena masalah furuiyyah. Adapula orang yang terlibat dalam pemilu, meskipun memiliki niat yang baik untuk memperjuangkan Islam, dicap sebagai kaum musyrikin. Adapula yang dengan bangga menyebut dirinya liberal, sudah tidak bisa membedakan antara mukmin dan kafir. Kelompok terakhir ini biasanya memandang semua agama sama saja, yang penting adalah agama kemanusiaan. (Hidayatullah, 2017)

Radikalisme tidak melulu berkaitan dengan agama, hal ini bisa kita lihat di Jakarta sebelum terjadi aksi bela Islam itu. Ketika a Hok masih menjabat sebagai gubernur ia berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu tempat di daerah Penjaringan Jakarta Utara. Saat ia turun dari mobil dan menuju lapangan, ia langsung diserbu oleh segerombolan anak muda dengan melempari batu. Sontak a Hok langsung berlari tunggang-langgang karena ketakutan. Di antara sekelompok pemuda tersebut kemudian meneriakkan takbir ‘Allah Akbar’ sebagai tanda perlawanan mereka terhadap rezim yang pongah. Tapi apakah sentiment yang muncul berupa radikalisme, ternyata bukan. Teriakan itu merupakan bentuk solidaritas terhadap kawan dan tetangga yang telah kehilangan rumah akibat penggusuran yang dilakukan oleh Ahok. Seorang remaja menjelaskan apa yang ia lakukan pada saya: “Saya termotivasi (melempar batu) karena separuh dari teman kelas saya tidak punya rumah lagi gara-gara Ahok. Oleh karena itu Ahok tidak bisa kami terima di sini.”(Wilson, 2017) Mereka marah karena aksi yang dilakukan Ahok telah melampaui batas, sehingga mereka melampiaskannya secara langsung. Namun pada saat itu publik banyak yang gagal dalam memahami ini semua sehingga sebagian pendukung Ahok

langsung memberi cap radikal kepada para pemuda itu. Perlu diketahui bahwa para pemuda tersebut kemudian juga terlibat dalam serangkaian aksi bela Islam. Menuding 'Aksi Bela Islam' sebagai agenda besar terorisme, selain hanya kegenitan, juga sangat sulit dibuktikan kebenarannya. Meski tidak menutup kemungkinan aksi massa disusupi dan dimanfaatkan oleh maneuver kelompok salafis-wahabi yang juga ingin mendapat keuntungan politik di dalamnya

Jika kita cermati masalah radikalisme ini sebetulnya tidak hanya berasal dari kalangan agama Islam saja. Istilah dan gerakan radikalisme ini memang memiliki daya tarik yang tinggi, selain itu adapula ekstrimisme. Dua hal ini memang sama bahayanya. Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa radikalisme bukan hanya berkaitan dengan Islam saja, tetapi ini merupakan pandemi global yang memang sedang mewabah dan menjadi masalah bersama. Dalam kristen juga terdapat gerakan radikal, di dalam negeri ini bisa kita lihat peristiwa pembakaran masjid di Tolikara sewaktu pelaksanaan shalat Iedul Fitri (17/7/2015). Dalam agama hindu, perusak masjid Babri di India adalah hindu radikal. Dalam agama yahudi, pembunuh Rabbi Isaac Rabin adalah hindu radikal

Menurut Seyed Rasoul Mousavi, pemahaman terhadap radikalsime dibagi menjadi tiga pendekatan. Pendektan tekstual, menurutnya adalah pemahaman terhadap al-Qur'an secara tekstual sehingga mengakibatkan sikap radikal, dan ini merujuk pada kelompok salafi [sic!]. Pendektan situasional maksudnya radikal disebabkan oleh situasi umat Islam karena pengaruh kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal adalah kondisi politik Islam yang represif sedangkan eksternal adalah campur tangan Barat ke dalam politik Islam. Karena pengaruh faktor eksternal, gerakan radikal wujud di dunia Islam. Sudah tentu radikalnya adalah dalam bentuk membela Islam atau menolak barat. Barat, khususnya amerika serikat tidak dapat mengalahkan gerakan radikal di atas kecuali setelah mengubah kebijakan, pola fikir dan perilaku mereka terhadap dunia Islam. Jadi invasi, sanksi-sanksi dan intervensi harus diakhiri. (Zarkasy, 2012: 185)



Hal yang hampir senada juga diungkapkan oleh Wan Mohd Nor Wan Daud, menurut beliau faktor internal dan eksternal. Yang internal disebabkan oleh de-tradisonalisasi dan de-sufisasi dalam diskursus keislaman dan etika, serta hilangnya otoritas keagamaan dan politik sedangkan yang eksternal dipicu oleh problem–problem umat Islam seperti masalah Palestina, Filipina selatan, Thailand Selatan, Asia Tengah, Kashmir. Selain itu juga sikap double standart dan Islamphobia barat terhadap Islam juga memicu timbulnya radikalisme.

Hal lain yang memiliki kaitan dengan radikalisme adalah kebodohan umat terhadap pemahaman agama, jauh dari bimbingan ulama, pengawasan hukum yang lemah sehingga muncul hukum alam, kesenjangan-kesenjangan yang terjadi baik itu kesenjangan secara politik, ekonomi, budaya, dan lainnya. Hal ini jika dibiarkan tentu akan berbahaya, karena semakin jauhnya jarak antara si miskin dan si kaya. Luka menganga yang macam ini tentu saja bukan persoalan biasa, karena juga berujung pada radikalisme.

### **C. SISI SOSIOLOGIS-HISTORIS RADIKALISME**

Sebagaimana penggalan kalimat yang dikatakan Vedi K. Hadiz, bahwa “kemunculan Islam politik menjadi satu-satunya kekuatan di Indonesia yang memiliki potensi untuk memobilisasi diri”. Nampaknya hal ini mirip dengan pernyataan khas dari barat, “setelah komunis hancur, maka musuh berikutnya adalah Islam”. Meskipun maknanya berbeda, tetapi memiliki kemiripan. Nampak Islam menjadi sebuah comon enemy. Hal ini juga dibenarkan oleh Arif Wibowo, dalam bukunya yang berjudul ‘Berebut Indonesia’ ia menyatakan, meskipun PKI mengalami kekalahan pada pembontakan 1965, bukan berarti Islam tidak menderita kerugian. Apalagi setelah kemudian perkembangannya seperti pendorong mobil mogok. Tidak hanya ditinggal saat mobil mulai berjalan, bahkan akhirnya ditabrak oleh pengendara mobilnya. Wajah rezim orde baru yang baru dibangun di atas puing kehancuran PKI itu ternyata juga memusuhi aspirasi politik umat Islam. (Wibowo, 2018: 157)

Runtuhnya kekuasaan otoriter diktator orde baru memang membuka kran bagi gerakan sosial politik, dan keagamaan baru. Dengan adanya organisasi tersebut tentu saja mereka menggukakan organisasi sebagai wadah bagi penyuaran aspirasi. Munculnya gerakan massif ini dimungkinkan karena adanya respon sosial yang tertunda (delayed respon) terhadap sistem otoriter orde baru. Dalam era reformasi Indonesia juga diwarnai dengan kelompok-kelompok keagamaan yang mengusung militansi agama yang kental. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka kebanyakan kelompok keagamaan juga didominasi kelompok Islam. (Walangjurnal) Kelompok-kelompok tersebut muncul secara diametral dan mampu menciptakan sebuah sistem untuk meregulasi kepentingan mereka di luar kepentingan bersama suatu kelompok masyarakat. Dengan sistem yang mereka yakini berupa pemahaman literer dan eksklusif, karena mereka menafisrkan ayat-ayat al-Qur'an secara tertutup.

Secara nasional, istilah radikalisme dikenal bersamaan dengan munculnya konflik agama dan etnis yang terjadi di Indonesia walaupun pada intinya partai politik tertentu juga melandasi kepentingan mereka dengan mengedepankan kelompok yang seiman. Dengan demikian belum ada suatu penafsiran yang komplit terhadap penamaan istilah radikal bagi kelompok dalam Islam tersebut. pemahaman terhadap radikaisme sendiri jika dilacak memang tidak berhubungan langsung dengan organisasi Islam yang concern dalam penegakan syariat Islam. Kelompok tersebut sebetulnya mengasosiasikan pemikirannya terhadap pemurnian ajaran Islam.

Sebagaimana berita yang terbaru, bahwa organisasi massa yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila akan dibubarkan, hal ini tentu sudah dirasakan oleh ormas semacam Hizbut Tahrir. Adapun kelompok lain yang sudah jelas masuk list daftar ormas seperti HTI adalah FPI, MMI, Laskar Jihad, Anshoruttauhid, dan lain sebagainya. Pencitraan kesemua organisasi tersebut radikal tidak bisa dilepaskan dari aktivitas yang mereka lakukan. Kemunculan mereka sesungguhnya adalah sebagai wujud dari respon psikologis yang tertunda dari kekuasaan yang otoriter, sesungguhnya hal ini adalah biasa, ketika keterbukaan itu sedang dibuka. Meskipun

sebagian ormas di atas dalam menyampaikan dakwahnya cenderung persuasif, namun tetap saja dianggap radikal karena tidak menggunakan Pancasila sebagai dasar negara.

Masalah pemberian cap radikal ini sebetulnya lebih bagus lagi jika tidak digunakan sebagai kesimpulan, tetapi cukup memberikan catatan-catatan khusus, kemudian diajak dialog serta pembinaan. Sesungguhnya kelompok-kelompok tersebut memiliki keunikan tersendiri, tampak bahwa kelompok-kelompok tersebut memilih Islam sebagai energi perjuangan mereka, agar tujuan mereka tercapai. Keunikan kelompok ini juga tidak bisa dipandang langsung berhubungan dengan kekerasan atau terorisme, karena bagaimanapun mereka menyadari bahwa Islam adalah agama yang damai yang perlu dikontekstualisasikan ataupun diintegrasikan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian patut disadari memang ada kelompok yang meskipun kecil memang berlebihan dalam beragama, contohnya adalah ISIS yang terang-terangan menggunakan agama Islam sebagai alat politik mereka, adapula sebagian kelompok yang menggunakan penafisiran secara letterlijk hingga menggunakan agama sebagai alat kekerasan, misal dengan bom bunuh diri ataupun perampasan. Padahal Islam tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan dalam mendakwahkan agama. Hal ini bisa dilihat dalam siroh Nabi, bahwa umat Islam tidak boleh membunuh orang yang lemah, tawanan, wanita, anak-anak, lansia, binatang, pohon, dan lain-lain. ini tentu berbeda dengan kisah perang salib. Tapi tidak bisa dipungkiri ada kelompok tertentu yang menggunakan jalan kekerasan untuk mencapai tujuan politis, semisal khawarij ataupun ISIS. Barangkali hal yang patut dipertanyakan adalah kesalahan dalam mengaitkan agama dengan tindakan ini. Karena belakangan ini banyak orang yang kemudian mengaitkan antara radikalisme dengan agama. Anggapan mereka, ujung dari paham radikalisme tersebut adalah terorisme, yang kemudian diasosiasikan oleh sebagian orang bahwa yang dimusuhi mereka adalah pemerintah karena ke thaghut nya. Tapi jika ini dilacak kembali, justru mereka ini

tidak berhadapan langsung dengan pemerintah ataupun agama tertentu, karena setiap aksi mereka justru terjadi di tempat umum. Nah, hal inilah yang patut dipertanyakan kembali.

Kemunculan radikalisme di negeri ini sudah memang bisa dibilang sudah cukup lama, kemunculannya tidak bisa dilepaskan dari rezim otoriter orde baru. Vedi K. Hadiz menjelaskan latar belakang secara sosiologis gerakan-gerakan radikal tersebut sebagai berikut, “Varian radikal Islam politik di masa pasca otoritarianisme di Indonesia bisa dengan jernih dipahami dalam hubungannya yang lebih luas dengan proses sosiologis dan sejarah pasang surutnya sejumlah gerakan berbasis Islam dalam konteks perubahan sosial secara global. Dalam kasus Indonesia, naik turunnya Islam politik selama fase panjang yang otoritarian orde baru—yang jatuh hampir bersamaan dengan masa perang dingin sangat bisa dipahami.” (Harian IndoPROGRESS, 2005) Dengan pernyataan ini tentu saja bertentangan dengan ide Huntington tentang cara membaca munculnya radikalisme diakibatkan oleh benturan peradaban. Saya lebih sependapat dengan Vedi K Hadiz, karena memang aspek ini jauh lebih realistis ketimbang tesis Huntington.

Tinjauan historis-sosiologis ini lebih pas jika digunakan untuk menganalisa kejadian di masa lalu, karena memang saat itu terjadi kekecewaan kelompok Islam yang tidak direkrut oleh kekuatan Barat untuk menghadapi komunis bersama militer di orde lama, contohnya seperti Darul Islam (DI) yang menciptakan kekecewaan dengan terus beroperasi di wilayah pinggiran dengan basis akar rumput yang dikemudian hari, “....menyediakan sumber utama oposisi terhadap Soeharto pada tahun 1970-an dan 1980-an dan selanjutnya mengalami penderitaan yang sangat hebat akibat penindasan negara hingga munculnya perubahan iklim politik pada 1990’’. (Harian IndoPROGRESS, 2005) Selain itu kecewanya kelompok Islam kelompok Islam yang tersingkir dari perubahan peta politik di era orde baru dimana Soeharto menekan peranan Islam demi stabilitas pembangunan yang di sisi lain justru sangat menguntungkan kapitalis. Berbagai bentuk kritik hingga aksi radikal pun terjadi bersamaan dengan adanya kebijakan yang

diluncurkan oleh Soeharto ini, karena sebagian kelompok Islam merasa dikebiri oleh kekuatan rezim orde baru. Pada pertengahan 1980-an, ketegangan antara orde baru dengan beberapa kelompok Muslim leih terbuka, dan di luar peristiwa berdarah itu, hubungan antara sebagian Islam politik dengan negara semakin tegang, muncul dalam bentuk penolakan sejumlah organisasi muslim terhadap dijadikannya Pancasila yang terdiri dari sekumpulan norma yang kabur menjadi ideologi negara atau asas tunggal di pertengahan 1980-an. (teguhhindarto.blogspot.com, 2017)

Kita tentu ingat, di era ini bermunculan misalnya Komando Jihad, kemudian pemboman candi Borobudur, serta dua cabang Bank BCA yang dimiliki oleh pengusaha Cina. Kejadian lain yang terjadi di pemukiman kelas pekerja di pelabuhan bersejarah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di tempat ini, Muslim dalam jumlah yang besar turun ke jalan untuk melakukan protes menemui ajalnya dalam sebuah konfrontasi berdarah dengan pasukan keamanan yang berada di tempat itu. Di lain tempat juga ada pembantaian yang terjadi di daerah Mesuji, Lampung. Umumnya mereka kecewa atas kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak menguntungkan kelompok Islam, tetapi justru menguntungkan kelompok Cina dan keturunannya. Van Bruinzen mencatat, ada 100 warga termasuk kelompok radikal yang direkrut sehingga “dalam konteks pengangguran tingkat tinggi dan ketiadaan kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan, menyusul krisis Asia, termasuk diantaranya banyak kekecewaan generasi muda, sebuah tenaga siap pakai selalu bersedia menjadi milisi-milisi tersebut.” ketegangan antara Islam politik dengan negara ini sedikit terhenti dengan terbentuknya ICMI, meskipun semua elemen belum merasa puas namun ini merupakan sebuah tanda baik, karena Soeharto mulai melirik kekuatan Islam.

Jika analisa di atas menekankan aspek sosiologis-historis gerakan Islam baik karena faktor intern maupun ektern yang memuncak pasca runtuhnya orde baru, maka berikut ini akan melihat bagaimana kemunculan dan kebangkitan radikalisme agama hingga ekstremnya berupa aksi terorisme. Mengenai hal ini Muhammad Najib Azca menjelaskan, “bahwa gejala radikalisme di

kalangan pemuda muslim di masa pasca orde baru bisa dilihat sebagai ‘aksi identitas’ yang dilakukan dalam rangka merespon dan menjawab krisis identitas yang mereka alami di tengah perubahan drastis dan dramatis yang terjadi di Indonesia pada fase awal transisi menuju demokrasi.” (teguhhindarto.blogspot.com, 2017). Memang berbagai macam aksi baik itu yang sporadis berupa protes ataupun yang lebih ekstrem berupa teror, merupakan respon dari problem yang bermunculan di permukaan yang belum mampu diselesaikan. Faktor kesenjangan, kemudian pemahaman agama yang dangkal turut menjadi penyebab munculnya radikalisme ini. Hal lain adalah ghuluw ataupun berlebihan dalam hal apapun.

#### **D. PERAN MUHAMMADIYAH**

Sejak kelahirannya Muhammadiyah selalu berjuang untuk kemaslahatan umat Islam. Muhammadiyah sedari awal juga memang mencita-citakan baldatun toyyibatun warofun ghofur. Hal ini juga selalu diperjuangkan oleh Muhammadiyah. Tidak lupa pula Muhammadiyah selalu hadir untuk membela kepentingan rakyat untuk mencapai suatu kemaslahatan. Ini bisa dilihat kiprah Muhammadiyah baik dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya, Muhammadiyah selalu melibatkan diri dalam hal tersebut. dalam kaitannya dengan persoalan ummat yang kian segunung ini, Muhammadiyah juga turut hadir di tengah-tengah masyarakat.

Upaya-upaya semacam ini memang sudah pernah atau sedang dilakukan, namun belum menjadi agenda yang mengemuka. Muhammadiyah dalam beberapa tahun terakhir cukup aktif bergerak melalui langkah “Jihad Konstitusi”. Yaitu, usaha meminimalisir ketimpangan ekonomi yang terwujud dalam ketimpangan kepemilikan alat produksi dan privatisasi, yang dilegalkan melalui regulasi. Jihad Konstitusi ini coba melawan kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat dan tidak sesuai atau bahkan “mengkhianati” amanat konstitusi, yang melegalkan praktik-praktik yang menggerogoti kedaulatan dan memperlebar ketimpangan, serta semakin menghimpit kehidupan rakyat yang sudah susah dalam hidupnya (Sangaji, 2017: 76).

Muhammadiyah sangat bijaksana dalam penyusunan atau perubahan rumusan mengenai maksud dan tujuan serta Asas organisasi. Muhammadiyah selalu menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan keadaan serta berpandangan jauh ke depan. Namun demikian jiwa atau identitas Muhammadiyah tetap dipertahankan. Hal ini yang menyebabkan Muhammadiyah mampu terus hidup, tumbuh, dan berkembang diseluruh penjuru dunia untuk memberikan pencerahan. Begitupun ketika tahun 1982, ketika ada gagasan Pancasila sebagai asas tunggal, dan UU No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah pun menerima Pancasila sebagai asas tunggal ketika Muktamar ke-41 di Solo pada tanggal 7-11 Desember 1985. (Suhanto, 2017)

Muhammadiyah begitu berhati-hati dalam merespon dan menanggapi asas tunggal, setelah mendapatkan kepastian asas tunggal dari pidato Presiden Soeharto, maka Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melakukan sidang Tanwir pada bulan Mei 1983, yang menghasilkan keputusan:

- 1 Muhammadiyah setuju memasukkan Pancasila dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah dengan tidak merubah asas Islam yang ada sekarang ini.
- 2 Masalah tersebut adalah masalah nasional yang dihadapi oleh Pimpinan Pusat secara nasional. Oleh karena itu Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan lain-lain tidak dibenarkan untuk mengeluarkan pendapat ataupun mengambil sikap mengenai “Asas Tunggal” tersebut.
- 3 Pembahasan akan dilakukan dalam Muktamar ke-41 yang akan datang. PP Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah bertanggal 27 September 1983, karena ada laporan dari berbagai daerah dan wilayah di seluruh Indonesia, bahwa Pemerintah setempat mengadakan pertemuan dengan Pimpinan berbagai organisasi termasuk Muhammadiyah dan minta pernyataan untuk setuju dan menerima Asas Tunggal Pancasila. Surat tersebut berisi: “ Pimpinan Muhammadiyah disemua tingkat tidak dibenarkan menanggapi atau menyatakan pendirian mengenai masalah Asas Tunggal Pancasila. Wewenang mengenai hal tersebut sepenuhnya berada pada PP Muhammadiyah.”

Itulah beberapa hal yang dicatat oleh Suhanto dalam sebuah makalahnya yang berjudul *Indoktrinasi Pancasila di Masa Orde Baru*. Dengan demikian sedari awal Muhammadiyah tidak pernah mempertentangkan keberadaan Pancasila baik sebagai asa tunggal ataupun sebagai landasan dasar negara.

Muhammadiyah merupakan partner dari pemerintahan untuk membangun sebuah negeri yang gemah ripah lohjinawi, toto tentrem kerto raharjo. Bagi Muhammadiyah, pembahasan pancasila sebagai dasar negara sudah selesai. Pancasila dengan rumusannya yang sekarang adalah rumusan yang mempersatukan Indonesia menjadi seperti sekarang ini. tugas umat Islam tentu saja tidak perlu mempertentangkan Pancasila dengan Islam, namun tugas kita adalah mengisi tafsir Pancasila dengan nilai-nilai Islam. Serta menjaganya agar terhindar dari tafsir kaum sekuler, anti Tuhan, leberal dan lain sebagainya.

Pancasila adalah hadiah terbesar untuk umat Islam yang dipersembahkan oleh pendahulu kita. Isinya pun tidak bisa dilepaskan dari pandangan hidup Islam, karena memang sebagaian bahasa yang digunakan dalam lima sila tersebut diserap dari bahasa arab yang mengandung makna adil, adab, hikmah, musyawarah, dll. Tentu saja hal ini tidak akan ditemui di luar Islam. Paling baru adalah, Muhammadiyah dalam Muktamar ke-47 di Makassar telah melahirkan sebuah dokumen negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Asyahadah*, sebuah dokumen yang mengingatkan seluruh anak bangsa Indonesia telah dan masih mempunyai landasan atau nilai dasar negara yang menjadi alat untuk menyatukan bangsa yang majemuk untuk menjadi satu kesatuann yang utuh yang bernama NKRI.

Hal ini dimaksudkan agar warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya, tidak terjebak dalam persepsi yang salah dalam berbangsa dan bernegara. Karena belakangan muncul slogan-slogan dari kelompok tertentu seolah ingin mengkapling NKRI hanya untuk kelompoknya. Dengan berpandangan Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Asyahadah*, maka saat ini yang diperlukan dan dibutuhkan adalah pembuktian kepada zaman, karena



bagaimanapun masa-masa pertentangan pandangan telah selesai dalam siding konstituante berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan bukan saatnya lagi berdebat mengenai dasar Negara.

Mengenai perpu ormas yang terbaru, Muhammadiyah belum mengeluarkan statmen secara resmi, hanya saja para tokoh Muhammadiyah banyak yang menaytakan pendapatnya akan hal ini. Menurut beberapa tokoh, dikhawatirkan perpu ini akan mengancam kehidupan demokrasi yang baru beranjak dewasa. Adapula yang berpendapat bahwa terlalu mahal jika untuk membubarkan HTI dengan menerbitkan perpu ini, mestinya pembubaran ini melalui mekanisme pengadilan, agar tidak timbul kecurigaan. Hal lain yang menegani radikalisme, Muhammadiyah menyarankan agar pemerintah menggunakan pendekatan dialog, karena bagaimanapun yang berbau isme ini tidak akan selesai jika pemerintah menggunakan pendekatan represif. Represif justru akan menimbulkan dendam dari kelompok tertentu. Persoalan radikalisme memang tidak bisa di gebyah uyah dalam memahami konsep operasionalnya, bahkan dalam hal pencegahannya sekalipun akan gagal, jika dalam memahami pengertian radikalismenya salah. Untuk itu, dalam memahami persoalan yang berkaitan dengan paham atau ideologi ini harus dipelajari secara seksama serta dengan cara yang bijak. Dan ini berlaku untuk semua faham yang mirip dengan gerakan radikalisme atau faham menyimpang lainnya.

## **E. KESIMPULAN**

Sisi gelap radikalisme memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang bangsa ini, di sinilah perlu diketahui letak serta kebingungan dan ambiguitasnya. Bahwa gejala radikalisme di kalangan pemuda muslim di masa pasca orde baru bisa dilihat sebagai ‘aksi identitas’ yang dilakukan dalam rangka merespon dan menjawab krisis identitas yang mereka alami di tengah perubahan drastis dan dramatis yang terjadi di Indonesia pada fase awal transisi menuju demokrasi. Sementara itu radikalisme juga tidak selalu berkaitan dengan agama, karena dari sisi pengertian memang lebih dekat kepada politik. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya

radikalisme, sehingga jika ada orang yang mengatakan bahwasannya radikal selalu berkaitan dengan agama, maka pernyataan tersebut subyektif dan terkesan tergesa gesa.

Pilihan yang tepat adalah mengganti kata radikal dengan kata ekstrem, karena memang kata ini lebih tepat jika digunakan untuk menggambarkan kondisi ini. Karena dalam Islam sekalipun tidak membenarkan segerala bentuk kekerasan, walaupun ada tentu saja mereka hanya menggunakan Islam sebagai alat politik, dan ini memang ada dalam sejarah. Islam merupakan suatu konsepsi yang final dan lengkap untuk panduan hidup di muka bumi. Pun demikian dengan Muhammadiyah, yang tidak membenarkan segala bentuk kekerasan yang dilakukan teroris ataupun penjajah dan segala bentuk paham yang menyimpang.

Mengenai para korban yang sudah dikatakan terjangkit virus ini mestinya tidak langsung main tembak tetapi digunakan pendekatan persuasif, perlakukan mereka sebagai manusia pada umumnya, dan diberi pemahaman yang benar agar tidak kembali pada jalan yang salah. Meminjam istilah Cak Nun, “kalau kamu bertemu dengan kucing yang jatuh dari comberan yang airnya hitam dan bau, jangan kau kamu tuding sambil dikotbahi, “wahai kucing-kucing yang hidup dalam comberan yang kotor, bangkitlah dan keluarlah dari kegelapan menuju cahaya-minadz dzulumati ila nur,”ya kucingnya paling Cuma nengok sambil meong-meong. Tentu yang harus dilakukan adalah memandikannya agar kembali bersih. Mengakhiri kesimpulan ini ini, saya akan mengutip pernyataan dari Dr. Babu Susselan

“Islam has unique worldview, Islamic closed paradigm constitutes cultural patern, beliefs, moral values, and social norm shared by the people of Arabia during the sixth century. For countries, rigid, authoritarian, and dualistic Islamic Worldview have been shaping behaviour. The islamic closed chanel thinking is refelcted in varied islamic expressions, as morality, social relationship, interpersonal comunication has well as ethical acts.”

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Arianto Sangaji, dkk. 2017. *Bela Islam atau Bela Oligarki? Pertalian Agama, Politik, dan Kapitalisme di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Indoprogres & Islam Bergerak.
- Arif Wibowo. 2018. *Berebut Indonesia: Pergumulan Kultural Misi Kristen dan Dakwah Islam di Indonesia*. Surakarta: PSPI Publishing
- Hamid Fahmi Z. 2012 *Misykat; Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam*. Jakarta: INSISTS.
- Vedi R.Hadiz: “*Toward a Sociological Understanding of Islamic Radicalism in Indonesia*”. Terj Coen Husain Potoh & Fitri Mohan. ‘Menuju satu pemahaman sosiologis terhadap radikalisme Islam di Indonesia (*bagian 1*)’, Harian Indoprogres edisi mei 2006
- Vedi R.Hadiz: “*Toward a Sociological Understanding of Islamic Radicalism in Indonesia*”. Terj Coen Husain Potoh & Fitri Mohan. ‘Menuju satu pemahaman sosiologis terhadap radikalisme Islam di Indonesia (*bagian 2*)’, Harian Indoprogres edisi 7 mei 2007
- Coen Husain Pontoh: *Agama dan Negara: Jejak Persilangan Kekerasan*. Harian Indoprogres Edisi 4 Oktober 2011
- Ian Wilson. *Making enemies out of friends*. Terj Amalinda Savirani “Teman dijadikan Musuh”. Harian Indoprogres edisi 2017
- Suhanto, *Indoktrinasi Pancasila di masa Orde Baru*, makalah disampaikan pada seminar di Ma’had aly Al-Ghazally Surakarta tanggal 2 mei 2016
- Hidayatullah.com, Adian Husaini: *Posisi Muhammadiyah*, diakses pada 29 Juli 2017
- Walangjurnal. Fahmi Sallatohy: *Pelabelan bagi kelompok*
- Wikipedia .org, *radikalisme sejarah*, diakses pada 28 Juli 2017
- KBBI (online), diakses pada 29 Juli 2017
- Tempo.co. diakses pada 27 Juli 2017
- Teguhhindarto.blogspot.com, diakses pada 29 juli 2017